

LAPORAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD) .

Sesuai itu, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra/K/L) dan bahan masukan untuk finalisasi RKP, dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2009 merupakan rencana kerja yang menjadi salah satu bahan utama dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintahan Daerah Kota Parepare, RKPD mempunyai fungsi

pokok sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik, (2) Pedoman dalam penyusunan APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun, dan (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2009, maka arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2009 kemudian dijabarkan ke dalam 6 prioritas pembangunan, sebagai berikut : (1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, (2) Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pemberantasan Penyakit Manular, (4) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Daerah, (5) Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan Investasi Daerah, serta (6) Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan. . Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa program dan kegiatan pokok yang disusun oleh pemerintah daerah bersifat realistis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya, APBD yang berpedoman kepada RKPD harus dijaga konsistennya sehingga 6 (enam) prioritas yang telah disepakati tersebut benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting dilaksanakan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengeluaran dan pembiayaan mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia dalam APBD.

Berdasarkan dengan hal tersebut dan sebagai bagian dari proses penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah, maka dalam perencanaan pembangunan tahun 2009, perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tahun 2009 yang akan

membahas dan penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja-SKPD tahun 2009 untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD tahun 2009. Kebijakan yang tertuang di dalam RKPD 2009, akan diarahkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2009 sekaligus akan menjadi kebijakan pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menyusun suatu dokumen rencana tahunan yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan usulan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD akan memuat beberapa pembahasan antara lain Kerangka Umum Pembangunan, Agenda dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja, Ringkasan Rencana Kerja dan Pendanaan.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD yaitu untuk mencapai keterpaduan perencanaan tahunan daerah secara efisien dan efektif serta untuk mempertajam prioritas pembangunan berdasarkan berbagai permasalahan daerah saat ini, dan juga sebagai acuan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2009.

C. PERMASALAHAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir telah memberikan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, namun masih ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Secara bertahap berbagai masalah mendesak yang dihadapi Kota Parepare diharapkan dapat diatasi melalui penganggaran pembangunan dalam APBD pada bidang-bidang dan sektor pembangunan sesuai dengan kewenangan yang ada dan dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah (Badan, Dinas, Kantor dan instansi-instansi lainnya).

Secara umum isu dan masalah tersebut terdiri dari :

1. Penataan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Program penataan hukum yang telah dilaksanakan selama ini telah mendapat tanggapan baik dari stakeholders, karena baik pada proses dan pelaksanaannya telah melibatkan secara langsung stakeholder. Proses penyusunan produk hukum sepenuhnya telah menggunakan metode partisipatif. Namun disisi lain penerapan dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya optimal, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih mantap antara lembaga-lembaga yang berkompeten dalam penegakan perda tersebut, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam reformasi birokrasi secara bertahap telah dilaksanakan, namun belum memberikan hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Peran birokrat yang profesional diharapkan mampu menciptakan kondisi bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif, adil dan merata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pelayanan publik, baik menyangkut kualitas kebijakan maupun manajemen pengelolaannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, berkualitas dan berorientasi pada pemberian pelayanan prima. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan masih dititikberatkan pada model dan struktur ketatalaksanaan (manajemen) pemerintah daerah belum memadai, belum efektifnya pengawasan dan akuntabilitas program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), belum diterapkannya fungsi manajemen kinerja secara taat asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, masih banyaknya masalah teknis dan non-teknis pada pelaksanaan kegiatan di SKPD, belum terbangunnya secara mendasar budaya kerja aparatur yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga hasil pelayanan kepada masyarakat belum begitu optimal.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Perkembangan perekonomian di Kota Parepare pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan solusi pemecahan kondisi sosial yang masih rawan utamanya kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Parepare beserta stakeholder terkait telah berupaya dalam proses peningkatan sektor ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan yang berupaya menumbuhkan kreatifitas dan kerjasama dalam pengembangan sektor industri, jasa dan niaga. Namun kondisi infrastruktur perekonomian Kota Parepare masih tergolong rendah dibanding dengan kebutuhan akan perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Parepare.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam bidang pengembangan perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang belum disertai dengan distribusi pendapatan penduduk yang merata. Dengan kata lain, pembangunan yang telah dilaksanakan belum dinikmati sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari angka pengangguran yang masih besar, jumlah warga miskin masih cukup besar, serta angka putus sekolah masih banyak. Permasalahan tersebut masih banyak yang diakibatkan oleh faktor ekonomi sehingga kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan pada sektor-sektor tersebut.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan dari berbagai aspek diharapkan akan mampu mengangkat tingkat kesejahteraan dan kualitas sumberdaya penduduk Kota Parepare. Aplikasi dari hakekat pembangunan tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kesehatan, gizi, pendidikan, produktivitas dan akhlak mulia, jumlah dan laju pertumbuhannya serta refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk yang merespon pembangunan ekonomi daerah Kota Parepare. Dalam upaya mempercepat tujuan tersebut, maka kesiapan sumberdaya manusia diharapkan mampu mendorong upaya-upaya pembangunan dengan memperbaiki bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan keolahragaan.

Pembangunan sektor pendidikan diakui belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata, berkualitas dan terjangkau. Hal ini terlihat masih adanya anak putus sekolah dan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Partisipasi masyarakat dalam membangun dunia pendidikan tergolong cukup baik, namun kemampuan sebagian besar kelompok masyarakat dalam menjangkau biaya pendidikan masih menjadi masalah dilingkungan dunia pendidikan. Fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun peningkatan sumberdaya tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa/murid belum merata dengan baik, selain itu perhatian bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa dan berprestasi di bidang olahraga belum menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Pembangunan sektor kesehatan sudah menampakkan peningkatan yang signifikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga medis dan non-medis sudah cukup memadai sesuai kebutuhan, sehingga percepatan Kota Parepare menjadi Kota Sehat Tahun 2008 dapat kita wujudkan. Namun, perkembangan sektor kesehatan tersebut, harus tetap dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan lingkungan sehat, peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan, pencegahan dan pemberantasan

penyakit dan perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya, peningkatan pada sektor kesehatan akan didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya peningkatan mutu layanan, pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan dan pengendalian obat di setiap unit layanan kesehatan.

Masalah pembangunan olahraga yang dihadapi di Kota Parepare adalah masih kurangnya fasilitas olahraga baik berupa sarana maupun prasarana olahraga dibanding dengan minat dan keinginan masyarakat yang cukup besar dalam berolahraga. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan tingkat kerawanan terhadap bahaya narkoba, HIV/AIDS dan masalah-masalah sosial lainnya di kalangan masyarakat. Olahraga yang diterjemahkan sebagai bentuk kegiatan fisik yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, dapat juga digunakan sebagai ajang rekreasi/hiburan dan sekaligus sebagai sarana untuk mencari prestasi,

4. Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam di Kota Parepare merupakan suatu tantangan yang cukup besar, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakatnya membutuhkan kreatifitas dan kerjasama yang baik dalam mengembangkan dan mengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang lebih baik.

Potensi-potensi Sumberdaya Alam saat ini masih belum terkelola dengan baik dan maksimal sehingga hasil yang diharapkan belum mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Demikian pula dengan kualitas lingkungan hidup yang dirasakan cenderung semakin menurun dan mengakibatkan timbulnya pengaruh terhadap sektor kehidupan lainnya. Kondisi pengelolaan lingkungan hidup pada saat ini menunjukkan adanya ancaman penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Kasus pencemaran lingkungan pada skala kecil dan kasuistis pada Daerah Aliran Sungai KarajaE perlu mendapat perhatian khusus, mengingat hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ketersediaan air permukaan untuk

konsumsi air bersih di Kota Parepare. Meskipun hal tersebut belum sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, tetapi perlu ditangani lebih dini agar sungai tersebut tidak kehilangan fungsi ekologisnya.

5. Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kota Parepare masih mengarah pada wilayah simpul distribusi barang dan jasa serta pusat pelayanan lainnya, sehingga masih nampak adanya kondisi infrastruktur dan fasilitas umum yang belum lengkap dan maksimal di daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan utamanya daerah "kota atas".

Penyediaan infrastruktur yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air (pengairan di wilayah pertanian Bacukiki) masih memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kota Parepare karena daerah tersebut merupakan daerah pertanian yang potensial, walaupun luas lahan sangat terbatas. Sedangkan di wilayah perkotaan, saluran drainase yang berguna untuk mengendalikan banjir ternyata banyak yang tidak berfungsi maksimal, sehingga pada saat musim hujan masih banyak lokasi di perkotaan yang menjadi daerah genangan, selain itu manajemen pemeliharaan mutu serta kualitas sarana dan prasarana perkotaan yang tidak diatur berdasarkan skala prioritas dan mendesak masih berlangsung.

Pertumbuhan penduduk termasuk penduduk urban yang cenderung berada di pusat-pusat ekonomi menjadi permasalahan tersendiri sebagai resiko pertumbuhan sebuah kota yang memerlukan kebutuhan hunian yang layak, pelayanan penyediaan sarana dan prasarana pendukung permukiman, sehingga diharapkan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk memberikan perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang lebih layak.

D. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2009 ini adalah :

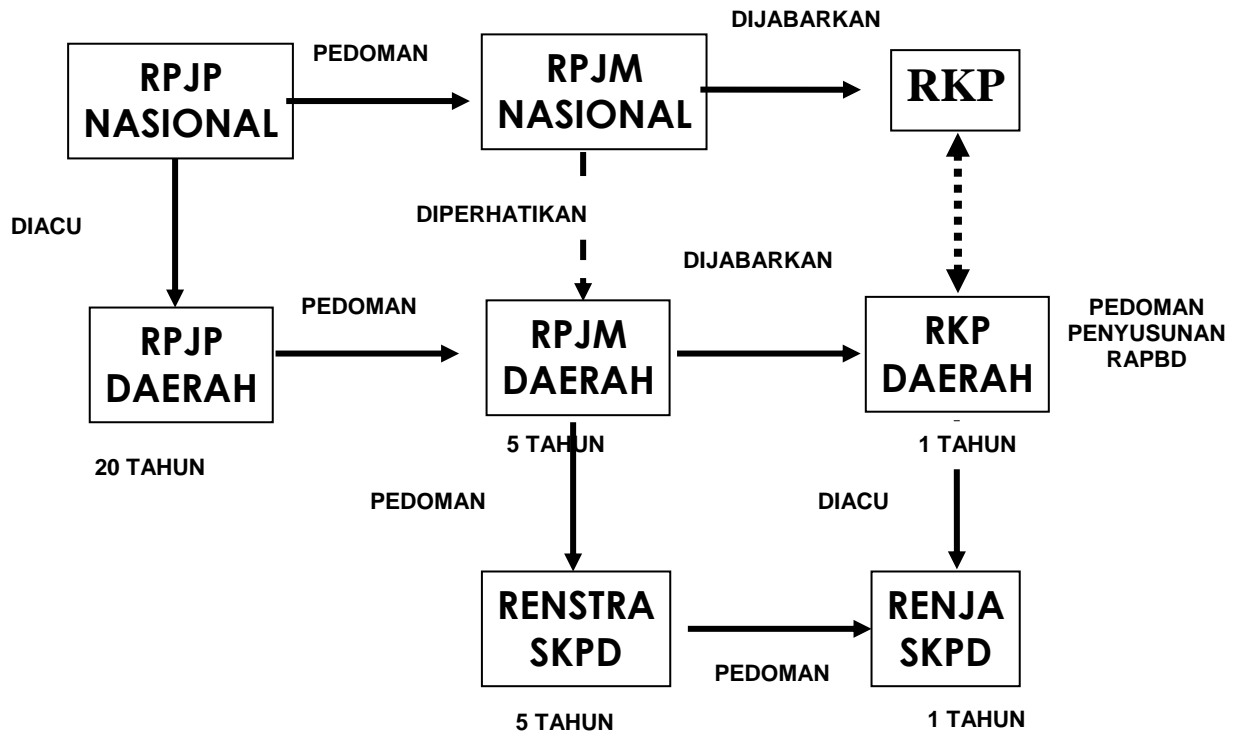
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007.
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Parepare Tahun 2003 – 2008.
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare Tahun 2006 – 2008

E. HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Propinsi dan RKP. RKPD Kota Parepare memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat.

Berdasarkan sistematika perencanaan daerah, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang harus disediakan adalah tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat arah dan kebijakan pembangunan dengan kurun waktu 20 (dua puluh tahun) Tahun 2005 – 2025, selanjutnya RPJP ini dijabarkan dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, namun karena Pemerintah Daerah Kota Parepare masih membahas dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selain itu masa dan jangka waktu dari RPJM Kota Parepare Tahun 2006 – 2008 dan Rencana Strategis Daerah Kota Parepare Tahun 2003 – 2008 telah habis, maka penentuan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas mengacu pada draft RPJPD Kota Parepare dan kebijakan-kebijakan Propinsi Sulawesi Selatan dari pusat serta kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang dianggap penting dan strategis.

Skema Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Proses penyusunan RKPD didahului dengan rancangan draft RKPD Kota Parepare yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan perubahan lingkungan strategis dengan tetap memperhatikan kesesuaian sumberdaya yang tersedia. Penyusunan Draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2009, diselenggarakan melalui proses kegiatan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh stakeholder melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota).

Draft RKPD disempurnakan melalui bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil dari Musrenbang Propinsi serta dikaji lebih lanjut oleh Tim dari Bappeda Kota Parepare yang selanjutnya dirumuskan kembali RKPD Final yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Parepare.

Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2009 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Permasalahan, Landasan Hukum, Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II KERANGKA UMUM PEMBANGUNAN : memuat tentang Visi dan Misi, Kondisi Pembangunan (Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial Budaya, Pembangunan Infrastruktur), Kondisi Pembiayaan Pembangunan

BAB III AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 : memuat tentang Agenda Pembangunan Tahun 2009, Prospek Pembangunan Tahun 2009, Prioritas-prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009

BAB IV RINGKASAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II KERANGKA UMUM PEMBANGUNAN

A. VISI DAN MISI

Sebagai upaya mewujudkan aspirasi atau cita-cita luhur dan harapan masa depan yang ingin dicapai oleh segenap komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka segenap unsur/stakeholder baik pemerintah daerah, dunia swasta, serta unsur masyarakat mencetuskan dan merumuskan Visi Daerah Kota Parepare yaitu :

“Mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera berkelanjutan di Kota Parepare yang berpantai dan berbukit indah serta berfungsi kuat sebagai pusat niaga, jasa dan pendidikan”

Untuk pencapaian cita-cita yang berkelanjutan tersebut, maka visi pembangunan tersebut selanjutnya dipertajam kedalam Visi Pemerintah Kota Parepare 2003 – 2009 dengan rumusan visi Pemerintah Kota Parepare sebagai berikut :

“Mewujudkan Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan menuju Kota Bandar Madani”

Untuk mendukung terwujudnya cita-cita dan harapan komponen masyarakat Kota Parepare yang tertuang dalam visi Pemerintah Kota Parepare hingga tahun 2009 tersebut diatas, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Parepare sebagai berikut :

- Penataan Pusat-pusat pertumbuhan kota sebagai kota pelabuhan berdasarkan pada kehidupan masyarakat yang agamis dan berkelanjutan
- Pembangunan Kota Parepare, dilaksanakan diatas landasan partisipatif, demokratis dan nilai-nilai budaya lokal
- Penciptaan suasana nyaman dan indah dalam kondisi bersih, sehat, aman bahagia dan sejahtera.

B. KONDISI PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Ekonomi

a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode tahun 2002-2006, laju perkembangan ekonomi Kota Parepare cenderung berfluktuasi. Perkembangan nilai PDRB tertinggi terjadi pada 2002 dan 2005, yakni 14,52 persen dan 15,74 persen. Sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2003, hanya sebesar 12,87 persen. Perkembangan PDRB selama periode lima tahun terakhir (2002-2006) secara rata-rata sebesar 14,08 persen pertahun. Tingginya perkembangan PDRB pada tahun 2005 sedikit lebih tinggi di banding 2006.

Perekonomian di Kota Parepare mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,97 persen pertahun. Pertumbuhan nilai PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 6,86 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 hanya sebesar 5,00 persen. Selama lima tahun terakhir 2002-2006, tampak adanya kecenderungan pertumbuhan yang terus meningkat, hal ini disebabkan membaiknya hampir semua sektor ekonomi, walaupun persentasenya lebih banyak untuk konsumsi. Tingkat perkembangan ekonomi Kota Parepare pada tahun 2006 menurun hanya sebesar 13,38 persen, dari 15,74 persen tahun 2005. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 yang mencapai 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005, sebesar 6,08 persen. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi secara riil yang berfluktuasi.

Sementara itu tingkat inflasi tahun 2006 hanya rata-rata (6,13 %) lebih rendah dibanding dengan inflasi tahun 2005 rata-rata (8,58 %). Ini akibat pengaruh dari tingkat harga yang lebih normal 2006 di banding 2005, dimana dipengaruhi baik oleh kebijakan pemerintah maupun ketersediaan produk yang cukup di Kota Parepare.

b. Struktur Ekonomi

Selama tahun 2002-2006, struktur perekonomian Kota Parepare tidak mengalami pergeseran yang berarti dimana Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih merupakan kontributor terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kota Parepare, dengan kontribusi rata-rata sebesar 27,78 persen pertahunnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian masyarakat di Kota Parepare dominan pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan kontributor kedua adalah Sektor Angkutan dan Komunikasi yang rata-rata telah memberikan sumbangan sebesar 24,47 persen pertahun. Selanjutnya adalah Sektor Jasa-jasa dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,25 persen pertahun.

Untuk keadaan struktur ekonomi tahun 2006, menurut harga berlaku ada 4 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi di atas 10 persen, yaitu *Pertama* adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan sumbangan sebesar 27,67 persen. *Kedua* adalah Sektor Angkutan dan Komunikasi dengan sumbangan sebesar 24,52 persen. *Ketiga* adalah Sektor Jasa-jasa dengan sumbangan sebesar 14,09 persen. Dan yang *Keempat* adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan kontribusi sebesar 11,87 persen. Berdasarkan perkembangan ekonomi Kota Parepare tersebut, maka sudah selayaknya Kota Parepare dikatakan sebagai Kota Perdagangan/Niaga.

Berdasarkan kondisi PDRB Kota Parepare Tahun 2006 sektor-sektor dominan atau lapangan usaha yang mempunyai peranan terbesar dalam struktur perekonomian kota 6 tahun terakhir masih berada pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,12% tahun 2006), angkutan dan komunikasi (24,06% tahun 2006) dan sektor keuangan dan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,06% tahun 2006. Sektor-sektor lainnya yang menyusul dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam perekonomian kota adalah sektor Jasa-jasa (13,36%) dan Pertanian (8,09%). Struktur perekonomian tersebut di atas belum mengalami

perubahan atau pergeseran secara signifikan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong perkembangan investasi di sektor industri khususnya industri besar karena sektor ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas.

Tabel 1. Kondisi PDRB dan Inflasi Kota Parepare Tahun 2005 -2006

LAPANGAN USAHA		PDRB		Persentase PDRB		Pertumbuhan PDRB		INFLASI (%)	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1.	Pertanian	43.017,97	46.086,76	8.07	8,09	4,51	7,13	5,64	6,81
2.	Pertambangan & Galian	1.735,53	1.817,34	0.33	0,32	3,57	4,71	7,85	5,89
3.	Industri Pengolahan	17.065,02	17.815,01	3.20	3,13	5,01	4,39	5,80	6,88
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	7.449,10	7.949,87	1.40	1,40	5,74	6,72	6,81	8,33
5.	Bangunan	45.821,76	48.153,67	8.60	4,46	7,08	5,10	7,26	5,46
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	159.447,49	165.829,60	29.92	29,12	9,14	4,00	7,00	8,99
7.	Anggkutan & Telkom	129.096,78	137.001,42	24.23	24,06	7,04	6,12	8,83	6,74
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	65.235,36	68.695,37	12.24	12,06	-1,90	5,30	8,17	9,54
9.	Jasa-Jasa	64.024,07	76.101,43	12.01	13,36	6,26	18,86	19,83	4,52
	Rata –Rata	59.210,34		11,11	10,00	5,16	6,86	8,58	6,13

Sumber : Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2005/2006

Meskipun demikian harapan pemerintah kota untuk mewujudkan visi kota sebagai kota jasa, niaga dan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dengan meningkatnya peranan dan nilai investasi pada sektor-sektor tersebut didalam struktur perekonomian kota. Investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik telah mampu mendorong kegiatan perekonomian kota.

Dalam bidang pengembangan investasi pada sektor swasta telah ditempuh berbagai langkah yang dapat menarik kegiatan investasi dengan meningkatkan mutu dan kualitas infrastruktur kota, perbaikan pelayanan perizinan, promosi peluang investasi serta berbagai fasilitas yang diperlukan untuk memperkuat daya saing dan keunggulan kota.

Tabel 2. Pendapatan Perkapita Kota Parepare Tahun 2005 -2006

URAIAN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN	
	2005	2006	2005	2006
1. PDRB ATAS DASAR HARGA PASAR	786.090,78	891.486.10	532.893,08	569.455.47
2. PENYUSUTAN (juta rupiah)	81.118,83	82.469.83	56.201,79	59.776.27
3. PDRN ATAS DASAR HARGA PASAR	704.971,95	809.019.27	476.691,29	509.679.20
4. PAJAK TAK LANGSUNG	28.244,27	30.791.83	19.146,87	21.404.28
5. PDRN ATAS BIAYA FAKTOR	676.727,68	778.227.44	457.544,43	488.274.92
6. PENDUDUK (jiwa)	114.000	115.169.00	114.000.00	115.169.00
7. ANGKA PERKAPITA				
- PDRB (Rupiah)	6.895.533	7.740.704	4.674.501	4.944.520.00
- PENDAPATAN REGIONAL (Rp)	5.936.208	6.757.265	4.013.548	4.239638.00

Sumber : Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2005/2006

2. Pembangunan Sosial Budaya

Pemerintah Daerah Kota Parepare pada kurun 5 (lima) tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dalam bidang sosial budaya dengan memperbaiki berbagai pelayanan publik utamanya pada sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, agama, keluarga berencana dan kependudukan, ketenagakerjaan, kepariwisataan dan seni serta pemberdayaan perempuan.

Pembangunan di Bidang Pendidikan dilakukan dengan meningkatkan upaya-upaya pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan, antara lain :

1. Pemberian subsidi untuk pembebasan Dana Penyelenggaraan pendidikan (DPP) bagi semua anak didik di SD/MI dengan harapan tidak ada lagi anak usia SD/MI yang tidak bersekolah karena faktor biaya;
2. Penetapan sekolah unggulan pada setiap jenjang sebagai pilot proyek agar dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sekolah yang bermutu dengan penyediaan kebutuhan standar minimal sekolah sebagaimana yang diatur didalam Kepmendiknas No. 129 A/U/2004;

3. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, baik melalui rehabilitasi, melengkapi sarana penunjang, alat peraga dan menanggulangi sebagian kebutuhan buku pelajaran;

Dalam kerangka otonomi daerah pembangunan pada sektor kesehatan untuk menunjang sumberdaya manusia harus didukung pelayanan kesehatan yang memadai baik pelayanan rumah sakit maupun pelayanan dasar pada unit puskesmas maupun unit terkecil di tingkat kelurahan.

Kondisi pembangunan kesehatan telah cukup memadai baik pelayanan rumah sakit maupun pelayanan dasar pada unit puskesmas maupun unit terkecil di tingkat kelurahan.

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Parepare dapat dinilai dari penurunan jenis dan macam penyakit yang diderita oleh masyarakat yang ditunjang oleh sarana dan tenaga kesehatan. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan pada tahun 2009 merupakan suatu keharusan karena selain merupakan program strategis Pemerintah Pusat juga sebagai Program Strategis Pemerintah Daerah kota Parepare yang akan menjadikan Kota Parepare sebagai Kota Sehat Tahun 2008 dan mendukung Indonesia Sehat Tahun 2010.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan pembangunan wilayah kecamatan dan penataan ruang dengan memenuhi tuntutan azas manfaat untuk mengintegrasikan lini infrastruktur yang meliputi, transportasi, ketersediaan tenaga listrik, keterjangkauan telekomunikasi dan informasi, perumahan dan air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur perkotaan lainnya baik yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dengan melihat kondisi perkembangan pembangunan Kota Parepare yang demikian maju maka menurut beberapa ahli perkotaan mengatakan Kota Parepare berpotensi kuat untuk menjadi daerah yang maju dan modern pada era otonomi daerah apabila dikelola secara baik dan benar. Oleh karena itu

Pemerintah Daerah telah berupaya keras untuk membangun berbagai fasilitas baik infrastruktur maupun suprastruktur dalam upaya mendukung visi Kota Parepare sebagai Kota Niaga, Jasa dan Pendidikan.

C. KONDISI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Program Pemerintah Daerah terkait dengan pembiayaan daerah adalah diarahkan untuk pembayaran hutang pokok tahun-tahun sebelumnya, termasuk pembayaran hutang dan bunga untuk pinjaman daerah dalam rangka pembangunan Pasar Lakessi. Namun dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagaimana tahun sebelumnya Pemerintah Daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan Penyertaan Modal pada UKM dalam bentuk dana bergulir, termasuk pula penyelesaian hutang-hutang kepada pihak ketiga.

Komponen pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan ini terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah dalam konteks sistem penganggaran adalah setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Maksudnya adalah untuk memisahkan antara komponen pendapatan dengan komponen penerimaan dan atau komponen belanja dengan komponen pengeluaran yang selama ini pengertiannya dianggap sama, disamping itu juga dimaksudkan untuk menghindari double pencatatan dalam pembukuan pendapatan maupun belanja daerah.

Ada beberapa jenis transaksi yang dikategorikan dalam komponen pembiayaan antara lain pada sisi penerimaan meliputi (1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, (2) Pencairan Dana Cadangan, (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Penerimaan Pinjaman Daerah, (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan (6) Penerimaan Piutang Daerah

Sedangkan yang termasuk jenis pengeluaran pembiayaan meliputi (1) Pembentukan Dana Cadangan, (2) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, (3) Pembayaran Pokok Hutang, (4) Pemberian Pinjaman Daerah

1. Pendapatan

Berdasarkan potensi pendapatan daerah yang ada saat ini dan mencermati kondisi perekonomian secara makro, maka ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2008 maupun tahun 2009. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2009 diproyeksikan hanya sebesar Rp. 323.901.920.000,- atau hanya berbeda sedikit dengan kondisi pendapatan daerah pada tahun 2008.

Uraian target Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Kondisi Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2009

U R A I A N	TAHUN 2007 (Rp)	TAHUN 2008 (Rp)	PROYEKSI 2009 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	296.559.533.748	323.849.836.520	323.901.920.000
Pendapatan Asli Daerah	22.600.514.200	26.636.604.520	26.683.500.000
Pajak Daerah	3.082.089.200	3.397.298.120	3.398.000.000
Retribusi Daerah	14.384.125.000	17307.806.400	17.310.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	791.000.000	956.00.00	1.000.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	4.343.300.000	4.975.500.000	4.975.500.000
Dana Perimbangan	259.559.019.548	289.313.232.000	289.318.420.000
Dana BHP/BHBP	19.035.019.548	20.094.812.000	20.100.000.000
Dana Alokasi Umum	208.125.000.000	228.255.420.000	228.255.420.000
Dana Alokasi Khusus	32.399.000.000	40.963.000.000	40.963.000.000
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi			
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.400.000.000	7.900.000.000	7.900.000.000
Hibah	-		
Dana Darurat	1.000.000.000		
Dana BHP dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7.900.000.000	7.900.000.000	7.900.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.500.000.000		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.000.000.000		

Sumber : APBD Kota Parepare Tahun 2008

2. Belanja

Belanja Daerah Kota Parepare terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal).

Tabel 4. Kondisi Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2009

U R A I A N	TAHUN 2008 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2009 (Rp)
BELANJA DAERAH	377.408.277.763	
Belanja Tidak Langsung	166.184.662.710	160.750.000.000
Belanja Pegawai	146.661.831.260	146.800.000.000
Belanja Bunga	8.003.300.000	8.100.000.000
Belanja Bantuan Sosial	7.645.180.000	5.500.000.000
Belanja Hibah	3.524.351.450	
Belanja Tak Terduga	350.000.000	350.000.000
Belanja Langsung	211.223.615.053	189.611.920.000
Belanja Pegawai	19.028.093.300	-
Belanja Barang dan Jasa	58.909.502.011	-
Belanja Modal	133.286.019.742	-
Surplus / (Defisit)	(53.558.441.243)	
PEMBIAYAAN DAERAH	58.602.642.274	
Penerimaan Pembiayaan	71.309.342.274	35.960.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	30.109.342.274	3.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	41.200.000.000	32.960.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	12.706.700.000	9.500.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	10.706.700.000	7.500.000.000
Pembayaran utang PPJ		
Pembiayaan Netto	58.602.642.274	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	5.044.201.031	

Sumber : APBD Kota Parepare Tahun 2008

Jumlah belanja langsung diproyeksi sebesar Rp. 189.611.920.000,- sudah termasuk belanja pinjaman daerah (Pembangunan Pasar Lakessi) yaitu sebesar Rp. 32.960.000.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp. 40.963.000.000,- sehingga total alokasi belanja langsung yang dapat dianggarkan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 115.688.920.000,- (Rp. 189.611.920.000 – Rp. 73.923.000.000)

Kalau kita mencermati Usulan Rencana Kerja setiap SKPD, maka jumlah anggaran yang diusulkan sangat tinggi dibanding dengan kemampuan pendanaan belanja langsung yang tersedia, namun Usulan Renja SKPD tersebut tetap akan di proses berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan Kota Parepare Tahun 2009. Adapun jumlah usulan **Renja SKPD Tahun 2009** melalui belanja langsung yaitu sebesar **Rp. 333.032.932.878,-** yang terdiri dari rencana pendanaan **APBD Kota** sebesar **Rp. 261.605.299.878,-** rencana pendanaan **APBD Propinsi** sebesar **Rp. 6.656.000.000,-** dan **APBN** sebesar **Rp. 64.771.633.000,-** .

BAB III

AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

A. AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 merupakan akumulasi kegiatan pembangunan daerah yang disampaikan oleh SKPD serta rangkuman aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai rancangan awal regulasi (kebijakan) APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2009, berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan APBD Kota Parepare, APBD Provinsi dan APBN. Disamping itu RKPD ini juga diarahkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Arah kebijakan yang disusun pada masing-masing bidang pembangunan, selanjutnya diakomodir melalui program-program pembangunan yang membutuhkan pendanaan APBD, APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan pada masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka disusun 5 (lima) agenda pembangunan yang akan menjadi patokan dalam penentuan prioritas pembangunan tahun 2009. Adapun kelima agenda pembangunan untuk tahun 2009 terdiri dari (1) Pembangunan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan, (2) Pembangunan ekonomi, (3) Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, (4) Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum, dan (5) Pembangunan Sosial Budaya dan Ketenagakerjaan.

B. PRIORITAS – PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

Penentuan prioritas pembangunan Tahun 2009 di setiap Kabupaten/Kota, khususnya Kota Parepare tidak terlepas dari Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009. Prioritas Pembangunan yang tercantum pada RKP Tahun 2009 tersebut terdiri dari 8 (delapan) prioritas yaitu :

1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular

Berdasarkan hal tersebut, maka Pembangunan Daerah Kota Parepare tahun 2009 juga mengacu kepada prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun karena penentuan prioritas pembangunan provinsi belum ditetapkan melalui Musrenbang Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, maka program prioritas tetap mengacu pada draft RKPD Propinsi dan memperhatikan RKP 2009. Dengan keterbatasan sumberdaya dan kondisi umum yang dimiliki oleh Kota Parepare, maka tidak semua prioritas tersebut diangkat menjadi prioritas tahunan, karena memperhatikan banyak faktor seperti kebijakan nasional, provinsi dan kebijakan anggaran untuk Tahun 2009. Adapun prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

- Program Pendidikan Usia Dini;
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- Program Pendidikan Menengah;
- Program Pendidikan Non Formal;
- Program Pendidikan Luar Biasa;
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembangunan Perpustakaan;
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

- Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
- Program Keluarga Berencana
- Program Pelayanan Kontrasepsi
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Program Penyediaan informasi pelayanan publik dalam bidang kependudukan

3. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Program Obat dan perbekalan kesehatan
- Program Upaya kesehatan masyarakat
- Program Pengawasan obat dan makanan
- Program Pengembangan obat asli Indonesia

- Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan prasarana puskesmas / pustu dan jaringannya
- Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM DAERAH

- Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program Pembangunan jalan dan jembatan
- Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program Peningkatan penerangan jalan
- Program Peningkatan kawasan perkotaan
- Program Penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan
- Program Peningkatan sarana air bersih masyarakat miskin
- Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Program Peningkatan pelayanan angkutan
- Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

5. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENINGKATAN INVESTASI DAERAH

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil, Menengahyang Kundusif
- Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif
- Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil menengah

- Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian
- Program Perencanaan dan pengembangan hutan
- Program Pengembangan perikanan tangkap
- Program Peningkatan produksi hasil peternakan
- Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- Program Pengembangan industri kecil dan menengah
- Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
- Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- Program Pengembangan pemasaran pariwisata
- Program Pengembangan destinasi pariwisata

6. PENINGKATAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

- Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- Program Peningkatan kesempatan kerja
- Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- Program Peningkatan pelayanan perizinan satu atap

7. PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN LEGISLASI DAERAH

- Program Penataan peraturan perundang-undangan
- Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Program Penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Program Peningkatan pendidikan kedinasan
- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Program Perencanaan pembangunan daerah
- Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Program perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
- Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- Program Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi
- Program Kerjasama informasi dengan media massa
- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

BAB V

P E N U T U P

Untuk upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare yang lebih efektif, efisien serta optimalisasi pengalokasian sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 ini sebagai bahan acuan dalam menetapkan rencana kegiatan lebih lanjut.

Pemerintah Daerah Kota Parepare bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare berkewajiban menjaga konsistensi RKPD Tahun 2009 dengan pelaksanaan APBD Tahun 2009. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan program-program pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2009 hendaknya menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam mensinergikan serta menyelaraskan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan maupun kekosongan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

WALIKOTA PAREPARE

Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE